

ABSTRAK

Dalam rangka mengurangi pengangguran dilaksanakan suatu pengembangan kesempatan kerja. Pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja salah satunya adalah dengan program AKAN (Antar Kerja Antar Negara) yang melibatkan pihak swasta yaitu PPTKIS. Permasalahan yang muncul dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah banyaknya PPTKIS yang muncul, sehingga diperlukan perhatian yang besar dari Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten dalam pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri oleh PPTKIS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang dalam perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia khususnya Tenaga Kerja Wanita dan mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, observasi langsung, dan pencatatan dokumen.

Dari hasil analisis penelitian, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang menjalankan peranannya dalam perlindungan TKI ke Luar Negeri sesuai dengan UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang melakukan kegiatan-kegiatan yaitu pemberian informasi pada pencari kerja dan pada PPTKIS tentang adanya pencari kerja ke luar negeri, mengawasi/ memantau dan ikut membantu dalam tahap proses penempatan TKI di luar negeri yang dilakukan PPTKIS, meneliti dokumen-dokumen yang diperlukan, serta memonitor keberadaan dan kinerja PPTKIS. Faktor yang mendukung adalah SDM yang memadai, budaya organisasi, otonomi daerah serta teknologi.

Faktor yang menghambat adalah terbatasnya tenaga serta anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pengawasan terhadap TKI/khususnya TKW di luar negeri serta masih ada TKI/TKW yang berangkat tidak melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang serta masih adanya Calon TKI yang menggunakan jalur tidak resmi dalam mengurus penempatan mereka di luar negeri.

Keywords : Perlindungan hukum, Tenaga Kerja Indonesia, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

ABSTRACT

In order to reduce unemployment implemented an expansion of employment opportunities. Government in expanding employment opportunities one of which is the A.K.A.N program (Inter-State Interagency Working) which involve the private sector, namely PPTKIS. The problems that arise in the placement of Indonesian workers abroad is the number that appears PPTKIS, so it requires a great attention from the Department of Social, Manpower District in the implementation of the placement of Indonesian Workers Abroad by PPTKIS.

This study aims to determine how the role of the Department of Labor and Transmigration Rembang Regency in the protection of Indonesian Workers Labor especially Women and determine what factors that support and hinder the protection of Indonesian Workers abroad.

The research method used is descriptive qualitative. Data was collected in-depth interview to the parties involved in the research, direct observation and recording of documents.

From the analysis of the research, it is known that the Department of Social Welfare, Labor and Transmigration Rembang to play its role in the protection of migrant workers to the Foreign accordance with Law No.39 of 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad. Social Services, Manpower and Transmigration Rembang perform activities namely providing information on job seekers and the PPTKIS about the job seekers abroad, supervise / monitor and helped in the pipeline placement of workers abroad is done PPTKIS, examine documents -dokumen necessary, and monitor the availability and performance of PPTKIS. Factors that support is adequate human resources, organizational culture, autonomy and technology.

The limiting factor is the limited power and budget which is owned by the Department of Social Welfare, Manpower and Transmigration in the supervision of TKI / especially migrant workers abroad and there TKI / TKW departing not through the Department of Social Affairs, Labor and Transmigration Rembang and persistence Prospective workers who use unofficial channels to take care of their placement abroad.

Keywords: *legal protection, Indonesia Labor, Social Services, Manpower and Transmigration.*